

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2015. Kota Bogor Dalam Angka 2014. BPS Kota Bogor
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2014. Kota Bogor Dalam Angka 2013. BPS Kota Bogor
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2015. Hasil Interpretasi Penggunaan Lahan Tahun 2012. Pemerintah Kota Bogor
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2015. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2010 - 2029. Pemerintah Kota Bogor
- Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2015. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Masterplan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Bogor
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), 2015. Laporan Akhir Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai, Situ dan Sumur. Pemerintah Kota Bogor.
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), 2015. Review Inventarisasi lahan Kritis Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kota Bogor.
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), 2015. Pengujian dan Analisa Kualtias Limbah Cair Kegiatan Usaha/Industri Kota Bogor Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kota Bogor.
- Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), 2015. Penyusunan Grand Design Transportasi Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor
- . 2008. Proyek Pendayagunaan proyek Penataan Ruang Nasional Daerah PU Dirjen Penataan Ruang
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kota Bogor. 2015. Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna. Pemerintah Kota Bogor
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kelas II. Sekretaris Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Kebijakan tentang Pemanfaatan Air Hujan menggunakan sistem Sumur Resapan. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 Kebijakan tentang Pemanfaatan Air Hujan menggunakan sistem Lubang Resapan Biopori. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sekretaris Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta

